



# PROSIDING SEMINAR NASIONAL

Himpunan Dosen Pendidikan Guru Sekolah Dasar Indonesia Wilayah IV

Tema : “Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Menuju Pendidikan Dasar yang Berkualitas”

e-Jurnal: [www.jurnalpedagogika.org](http://www.jurnalpedagogika.org)

e-mail: [semnas.hdpgsdi2017@gmail.com](mailto:semnas.hdpgsdi2017@gmail.com)

## REFORMASI SEKOLAH DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN LITERASI

**Rizal**

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako  
e-mail: [rizrizal666@gmail.com](mailto:rizrizal666@gmail.com)

### ABSTRAK

Berdasarkan Berdasarkan hasil penelitian Programme for International Student Assessment (PISA) menyebutkan budaya literasi masyarakat Indonesia pada 2012 terburuk kedua dari 65 negara yang diteliti di dunia. Indonesia menempati urutan ke 64 dari 65 negara tersebut sementara Vietnam justru menempati urutan ke-20 besar. PISA menyebutkan tak ada satu siswa pun di Indonesia yang meraih nilai literasi ditingkat kelima, hanya 0, 4 persen siswa yang memiliki kemampuan literasi tingkat empat. Selebihnya di bawah tingkat tiga, bahkan di bawah tingkat satu. Berbagai program dan kegiatan terkait literasi telah dilakukan, mulai dari yang berupa kebijakan pemerintah hingga inisiatif-inisiatif yang dilakukan komunitas dan organisasi serta praktisi pendidikan, baik guru di sekolah hingga orangtua di rumah. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mencanangkan Gerakan Literasi Nasional dan Gerakan Literasi Sekolah di level nasional, yang salah satunya adalah gerakan 15 menit membaca di sekolah (Permendikbud No. 23 tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti). “Membaca lima belas menit merupakan langkah awal yang didorong di sekolah sebagai gerakan literasi, lebih baik lagi jika tidak hanya membaca, namun juga memaknainya. Reformasi sekolah ditandai dengan gerakan literasi, penyediaan buku yang memadai, ruang perpustakaan yang nyaman, serta mmbentuknya menjadi budaya yang dibiasakan dari konstruksi tata tertib sekolah.

**Kata Kunci** : Reformasi Sekolah, Literasi.

### PENDAHULUAN

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20/2003 dinyatakan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan bentuk watak serta peradaban bangsa yang berma'rifat dalam rangka mecerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pendidikan menjadi tumpuan harapan bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia serta menjadi sarana bagi pembentukan intelektualitas, bakat, budi pekerti serta kecakapan peserta didik. Pendidikan mempunyai peranan yang sangat besar dalam membentuk karakter, perkembangan ilmu dan mental seorang anak, yang nantinya akan tumbuh menjadi seorang manusia dewasa yang akan berinteraksi dan melakukan banyak hal terhadap lingkungannya, baik secara individu maupun sebagai makhluk sosial. Pendidikan secara umum adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkannya untuk memiliki kecerdasan, pengendalian kepribadian, keagamaan, akhlak dan budi pekerti. Menurut Crow and Crow (Muh. Ilyas Ismail, 2008: 6) pendidikan adalah proses yang berisi berbagai macam kegiatan yang cocok bagi individu untuk kehidupan sosialnya dan membantu meneruskan adaptasi dan budaya serta kelembagaan sosial dari generasi ke generasi.

Tuntutan “penciptaan” SDM yang unggul, membuat sistem serta model pendidikan harus mengalami transformasi. Telah banyak literatur yang merupakan buah pemikiran dan hasil penelitian yang membahas mengenai hal ini, bahkan beberapa model pendidikan yang sangat berbeda telah diterapkan oleh sejumlah sekolah maupun kampus di berbagai belahan dunia. Model pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan abad 21 tersebut hanya akan dapat terwujud jika terjadi perubahan paradigmatik dan pola tindak dalam berbagai konteks penyelenggaraan proses pendidikan dan pembelajaran. Secara paradigmatik perubahan tata cara penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pembelajaran di dalam kelas atau lingkungan sekitar lembaga pendidikan tempat mahasiswa/peserta didik menimba ilmu. Perubahan itu meliputi proses pembelajaran: 1) Dari berpusat pada guru menuju berpusat pada siswa, 2) Dari satu arah menuju interaktif, 3) Dari isolasi menuju lingkungan jejaring, 4) Dari pasif menuju aktif-menyelidiki, 5) Dari maya/abstrak menuju konteks dunia nyata, 6) Dari pribadi menuju pembelajaran berbasis tim, 7) Dari luas menuju perilaku khas memberdayakan kaidah keterikatan, 8) Dari stimulasi rasa tunggal menuju stimulasi ke segala penjuru, 9) Dari alat tunggal menuju alat multimedia, 10) Dari hubungan satu arah bergeser menuju kooperatif, 11) Dari produksi massa menuju kebutuhan pelanggan, 12) Dari usaha sadar tunggal menuju jamak, 13) Dari satu ilmu pengetahuan bergeser menuju pengetahuan disiplin jamak, 14) Dari kontrol terpusat menuju otonomi dan kepercayaan, 15) Dari pemikiran faktual menuju kritis dan 16) Dari penyampaian pengetahuan menuju pertukaran pengetahuan.

Penyelenggaraan pendidikan abad 21 lebih membuat peserta didik menjadi pembelajar yang aktif, bukan pembelajar yang pasif. Menemukan cara belajar yang efektif adalah upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas diri. Setiap orang mempunyai cara yang optimal dalam mempelajari informasi baru. Pengetahuan tentang mengetahui cara belajar yang berbeda akan membantu guru dimana pun untuk dapat mendekati semua atau hampir semua peserta didik hanya dengan menyampaikan informasi dengan cara yang berbeda-beda. John Dewey (1916 dalam Davies, 1987: 31) menyatakan bahwa belajar adalah menyangkut apa yang harus dikerjakan peserta didik untuk dirinya sendiri. Maka inisiatif harus datang dari peserta didik sendiri. Guru dan dosen adalah pembimbing dan pengarah, sementara yang harus mengemudikan kegiatan belajar adalah peserta didik yang belajar.

Perbedaan individual setiap peserta didik memiliki karakteristik sendiri-sendiri yang berbeda satu dengan yang lain. Kesadaran bahwa dirinya berbeda dengan peserta didik lain akan membantu peserta didik menentukan cara belajar dan sasaran belajar bagi dirinya sendiri. Peran guru dan dosen mengorganisasikan kesempatan belajar bagi masing-masing peserta didik berarti mengubah peran guru dan dosen yaitu menjamin bahwa setiap siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan di dalam kondisi yang ada (Sten, 1988: 224). Hal ini berarti pula bahwa kesempatan yang diberikan oleh guru akan menuntut siswa selalu aktif mencari, memperoleh dan mengolah perolehan belajarnya. Karenanya siswa harus dapat belajar secara mandiri melalui praktek pendidikan literasi.

Para pakar pendidikan sepakat bahwa tingkat literasi yang rendah berkaitan dengan tingginya tingkat drop-out sekolah, kemiskinan dan pengangguran. Ketiga kriteria tersebut adalah bagian dari indikator rendah indeks pembangunan manusia. Bahkan, menurut Fitzgerald Speigel dan Cunningham (1991), sangat mungkin ada hubungan positif antara tataran literasi orang tua dan tingkat apresiasi terhadap lingkungan literasi. Semakin tinggi tataran literasi semakin tinggi komitmen mereka untuk menciptakan lingkungan literat bagi anak-anaknya. Menurut Ollila & Mayfield 1992 predisposisi positif anak terhadap literasi akan diperkuat ketika mereka melihat yang lainnya membaca dan menulis serta berbicara tentang apa yang mereka baca dan tulis. Keterlibatan anak pada ragam peristiwa literasi seperti ini turut meningkatkan apresiasi mereka akan pentingnya menjadi literat sehingga dapat meningkatkan motivasi mereka untuk belajar.

Literasi juga bermakna praktik dan hubungan sosial yang terkait dengan pengetahuan, bahasa dan budaya (UNESCO, 2003). Karena itu, seyogyanya kebiasaan membaca itu harus dimulai dari keluarga. Karena kehidupan masyarakat itu bermula dari keluarga. Sehingga semua dimulai dari keluarga. Bahkan dalam deklarasi UNESCO (2003) itu menyebutkan pula bahwa literasi informasi terkait pula dengan kemampuan untuk mengidentifikasi, menentukan, menemukan, mengevaluasi, menciptakan secara efektif dan terorganisasi, menggunakan dan mengomunikasikan informasi untuk mengatasi berbagai persoalan. Karena begitu pentingnya literasi dalam kehidupan manusia terlebih di zaman informasi sekarang ini, maka begitu mendesaknya program literasi untuk segera dimasyarakatkan. Sasaran utama dan pertama literasi ini kaum muda Indonesia, khususnya para siswa (dari tingkat sekolah dasar sampai akhir) dan mahasiswa. Hal ini dikarenakan kaum akan segera mewarisi negara ini. Kemajuan dan perkembangan begitu juga kemunduran dan keterpurukan bangsa ini selanjutnya terletak pada kebijakan kaum muda jika kelak menjadi pimpinan.

Kebijakan yang cepat dan tepat akan sangat tergantung tingkat pemahaman terhadap literasi. Semakin tinggi tingkat pemahaman literasi suatu bangsa maka kebijakan itu lebih rasional. Sehingga ini membawa kemakmuran suatu bangsa secara keseluruhan. Gerakan Literasi Sekolah merupakan suatu usaha atau kegiatan yang bersifat partisipatif dengan melibatkan warga sekolah (peserta didik, guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, pengawas sekolah, Komite Sekolah, orang tua/wali murid peserta didik), akademisi, penerbit, media massa, masyarakat (tokoh masyarakat yang dapat merepresentasikan keteladanan, dunia usaha, dll.) dan pemangku kepentingan di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan.

Usaha ini dimaksudkan untuk membawa warga sekolah lebih cerdas dalam menyambut kedatangan zaman yang semakin informatif. Hal ini didasarkan pada pentingnya peranan literasi yang bisa mempengaruhi peradaban manusia untuk mempersiapkan insan intelektual, terutama usia sekolah untuk memenangkan persaingan global. Membaca akan membuka wawasan berfikir dan bisa mengetahui budaya orang lain. Dengan demikian, manusia satu dengan lainnya saling menghargai, tidak merasa paling benar sendiri dan kelak terciptalah kedamaian dunia.

Berdasarkan hasil penelitian *Programme for International Student Assessment (PISA)* menyebutkan budaya literasi masyarakat Indonesia pada 2012 terburuk kedua dari 65 negara yang diteliti di dunia. Indonesia menempati urutan ke 64 dari 65 negara tersebut sementara Vietnam justru menempati urutan ke-20 besar. PISA menyebutkan tak ada satu siswa pun di Indonesia yang meraih nilai literasi ditingkat kelima, hanya 0, 4 persen siswa yang memiliki kemampuan literasi tingkat empat. Selebihnya di bawah tingkat tiga, bahkan di bawah tingkat satu. Ini sungguh merupakan kondisi yang sangat memprihatinkan dalam rangka meningkatkan kemajuan negara. Karena Literasi merupakan jantung kemampuan siswa untuk belajar dan berhasil di sekolah. Juga dalam menghadapi berbagai tantangan pada abad 21. Berkaitan dengan hal ini maka hanya ada satu pilihan untuk memenangkan persaingan baik di bidang teknologi, perdagangan, pembangunan dan bidang-bidang lain yakni menggalakkan gerakan literasi nasional. Gerakan harus dilakukan secara terukur dan berkelanjutan serta harus mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Secara umum, capaian negara Indonesia selalu di bawah rerata negara peserta, misalnya capaian anak-anak kita pada tes PISA tahun 2015 hanya di angka 397, sementara rerata negara lainnya adalah 493. Capaian Indonesia pada survei PIACC pun memperlihatkan bahwa 70% orang dewasa kita memiliki kemampuan literasi pada level 1. Pada level ini, individu hanya mampu menangkap informasi familiar saja dari sebuah cerita alias tidak benar-benar memahaminya. Level 1 ini setara dengan tahap perkembangan membaca anak usia 9-14 tahun, padahal orang dewasa seharusnya sudah mampu mengonstruksi dan merekonstruksi bacaan. Indeks perilaku membaca dan aspek-aspek pendukungnya diukur oleh Connecticut State University dan Indonesia menempati urutan ke-60 dari 61 negara.

Faktor penyebab, salah satunya adalah gagalnya Program Perpustakaan Sekolah telah gagal menciptakan budaya membaca bagi siswa. Kunjungan siswa dan jumlah peminjaman buku sangat minim. Hal ini dikarenakan beberapa faktor:

1. Jumlah buku koleksi perpustakaan tidak cukup untuk memenuhi tuntutan kebutuhan membaca sebagai basis proses pendidikan. Rendahnya jumlah koleksi tidak diantisipasi dengan program pengadaan buku secara berkala.
2. Peralatan, perlengkapan dan petugas perpustakaan tidak sesuai kebutuhan. Sebagian petugas bukanlah tenaga pustakawan khusus dan minim mendapatkan peningkatan (pendidikan atau pelatihan ke pustakaan).
3. Sekolah tidak mengalokasikan anggaran khusus yang memadai untuk pengembangan perpustakaan sekolah. Akhirnya keberadaan perpustakaan menjadi tidak bermakna karena kurangnya program kegiatan dan pengembangan.

Berbagai program dan kegiatan terkait literasi telah dilakukan, mulai dari yang

berupa kebijakan pemerintah hingga inisiatif-inisiatif yang dilakukan komunitas dan organisasi serta praktisi pendidikan, baik guru di sekolah hingga orangtua di rumah. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mencanangkan Gerakan Literasi Nasional dan Gerakan Literasi Sekolah di level nasional, yang salah satunya adalah gerakan 15 menit membaca di sekolah (Permendikbud No. 23 tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti). “Membaca lima belas menit merupakan langkah awal yang didorong di sekolah sebagai gerakan literasi, lebih baik lagi jika tidak hanya membaca, namun juga memaknainya.

Sulzby (1986) menjelaskan, literasi adalah kemampuan berbahasa seseorang (menyimak, berbicara, membaca dan menulis) untuk berkomunikasi dengan cara yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Selanjutnya Sulzby juga menyatakan literasi secara sempit, yaitu literasi sebagai kemampuan membaca dan menulis. Graff (2006) mengartikan literasi sebagai kemampuan untuk membaca dan menulis. Literasi berasal dari kata bahasa Latin *littera* yang diartikan sebagai penguasaan sistem-sistem tulisan dan konvensi-konvensi yang menyertainya. Selanjutnya istilah literasi lebih diartikan sebagai kemampuan baca tulis, kemudian berkembang meliputi proses membaca, menulis, berbicara, mendengar, membayangkan dan melihat. Berkenaan dengan hal tersebut Richard Kern (2000, hlm. 16) mendefinisikan istilah literasi, sebagai berikut: “Literacy is the use of socially-, and historically-, and culturally-situated practices of creating and interpreting meaning through texts. It entails at least a tacit awareness of the relationships between textual conventions and their context of use and, ideally, the ability to reflect critically on those relationships. Because it is purpose-sensitive, literacy is dynamic-non static-and variable across and within discourse communities and cultures. It drawn on a wide range of cognitive abilities, on knowledge of written and spoken language, on knowledge of genres, and on cultural knowledge. Artinya, literasi adalah penggunaan praktik-praktik situasi sosial dan historis, serta kultural dalam menciptakan dan menginterpretasikan makna melalui teks. Literasi memerlukan setidaknya sebuah kepekaan yang tak terucap tentang hubungan-hubungan antara konvensi-konvensi tekstual dan konteks penggunaannya serta idealnya kemampuan untuk berefleksi secara kritis tentang hubungan-hubungan tersebut. Karena peka dengan tujuan, literasi itu bersifat dinamis-tidak statis-dan dapat bervariasi di antara dan di dalam komunitas dan kultur wacana. Literasi memerlukan serangkaian kemampuan kognitif, pengetahuan bahasa tulisan dan lisan, pengetahuan tentang genre (pengetahuan tentang jenis-jenis teks yang berlaku dalam komunitas wacana, misalnya teks naratif, eksposisi, deskripsi dan lain sebagainya) dan pengetahuan kultural.

Makna literasi yang pada awalnya hanya baca-tulis berkembang menjadi lebih luas dan lebih kompleks. Makna literasi tak melulu soal baca-tulis, namun walaupun demikian, literasi masih memiliki kaitan dengan kebahasaan. Berpikir kritis, dapat menghitung, memecahkan masalah, cara untuk mencapai tujuan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan potensi seseorang merupakan definisi baru mengenai literasi. Pada tahap awal anak memasuki bangku sekolah di kelas 1 sekolah dasar, membaca permulaan merupakan menu utama. Kemampuan membaca permulaan lebih diorientasikan pada kemampuan membaca tingkat dasar, yakni kemampuan melek huruf. Maksudnya, anak-anak dapat mengubah dan melafalkan lambang-lambang tertulis menjadi bunyi-bunyi bermakna. Pada tahap ini sangat dimungkinkan anak-anak dapat melafalkan huruf-huruf yang dibacanya tanpa

diikuti oleh pemahaman terhadap makna lambang bunyi tersebut.

Kemampuan melek huruf ini selanjutnya dibina dan ditingkatkan menuju pemilikan kemampuan membaca tingkat lanjut, yakni melek wacana. Yang dimaksud dengan melek wacana adalah kemampuan membaca yang sesungguhnya, yakni kemampuan mengubah lambang-lambang tulis menjadi bunyi-bunyi bermakna disertai pemahaman akan makna lambang-lambang tersebut. Dengan bekal kemampuan melek wacana inilah kemudian anak dipahamkan dengan berbagai informasi dan pengetahuan dari berbagai media cetak yang dapat diakses sendiri. Di kelas tinggi membaca dalam arti melek wacana adalah membaca pemahaman. Membaca pemahaman adalah kegiatan membaca yang dilakukan oleh seseorang untuk memahami isi bacaan secara menyeluruh. Membaca pemahaman dilakukan dengan menghubungkan skemata atau pengetahuan awal yang dimiliki pembaca dan pengetahuan baru yang diperoleh saat membaca, sehingga proses pemahaman terbangun secara maksimal. Untuk dapat memahami secara maksimal seorang guru harus memiliki strategi pemahaman.

Budaya literasi dimaksudkan untuk melakukan kebiasaan berfikir yang diawali dengan kegiatan membaca dan menulis hingga tercipta sebuah karya bahkan terjadinya perubahan tingkah laku dan budi pekerti yang baik. Gerakan Literasi Sekolah (GLS) adalah sebuah upaya yang dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang warganya literat sepanjang hayat melalui pelibatan publik mulai dari semua pemangku kepentingan di bidang pendidikan, dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga satuan pendidikan (peserta didik, guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, pengawas sekolah) juga melibatkan Komite Sekolah, orang tua/wali murid peserta didik, akademisi, penerbit, media massa, masyarakat (tokoh masyarakat yang dapat merepresentasikan keteladanan, dunia usaha, dll. ). Mengacu pada metode pembelajaran Kurikulum 2013 yang menempatkan peserta didik sebagai subjek pembelajaran dan guru sebagai fasilitator, kegiatan literasi tidak lagi berfokus pada peserta didik semata. Guru, selain sebagai fasilitator, juga menjadi subjek pembelajaran. Akses yang luas pada sumber informasi, baik di dunia nyata maupun dunia maya dapat menjadikan peserta didik lebih tahu daripada guru. Oleh sebab itu, kegiatan peserta dalam berliterasi semestinya tidak lepas dari kontribusi guru dan guru sebaiknya berupaya menjadi fasilitator yang berkualitas. Guru dan pemangku kebijakan sekolah merupakan figur teladan literasi di sekolah.

Tujuan Umum Gerakan Literasi Sekolah (GLS) adalah Menumbuhkembangkan budi pekerti peserta didik melalui pembudayaan ekosistem literasi sekolah yang diwujudkan dalam Gerakan Literasi Sekolah agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat. Sedangkan Tujuan Khusus Gerakan Literasi Sekolah (GLS) adalah: (a) Menumbuhkembangkan budaya literasi di sekolah. (b) Meningkatkan kapasitas warga dan lingkungan sekolah agar literat. (c) Menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan dan ramah anak agar warga sekolah mampu mengelola pengetahuan. (d) Menjaga keberlanjutan pembelajaran dengan menghadirkan beragam buku bacaan dan mewadahi berbagai strategi membaca.

Tahapan Pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah (GLS)

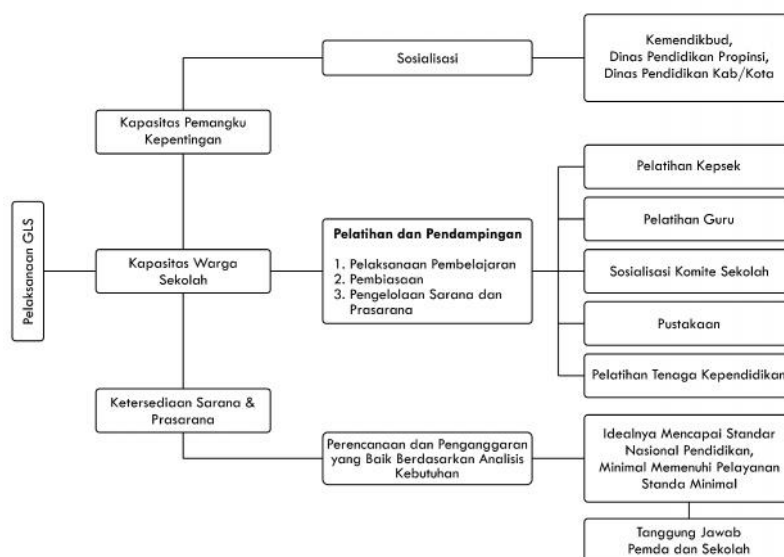
1. Meningkatkan kemampuan literasi di semua mata pelajaran: menggunakan buku pengayaan dan strategi membaca di semua mata pelajaran

2. Meningkatkan kemampuan literasi melalui kegiatan menanggapi buku pengayaan
3. Penumbuhan minat baca melalui kegiatan 15 menit membaca (Permendikbud No. 23 Tahun 2015)

Gerakan literasi yang sekarang ini marak, tidak hanya dibebankan tanggung jawabnya kepada pemerintah semata. Karena untuk membangun suatu kebiasaan justru dimulai dari unit terkecil di masyarakat yaitu keluarga. Selain di keluarga, membangun budaya membaca harus dimulai dari Sekolah. Sekolah sebagai sebuah lembaga pendidikan yang berperan sangat penting bagi pengembangan potensi sumber daya manusia. Namun harus kita akui secara jujur, bahwa secara umum kegiatan intelektual membaca dan menulis belum menjadi tradisi di sekolah. Bahkan di lingkungan sekolah yang notabene merupakan sebuah komunitas akademik, kegiatan membaca dan menulis di kalangan guru maupun siswa masih rendah. Kebiasaan membaca dan menulis harus terus ditumbuhkan di sekolah-sekolah sebagai dunia akademik, mengingat saat ini pemerintah telah mengeluarkan peraturan bahwa guru yang akan naik pangkat dituntut harus menghasilkan karya tulis. Jauhkan cara-cara yang tidak bermartabat sebagai pendidik melalui budaya plagiat atau men-subkontrakkan pembuatan karya tulis pada pihak-pihak penjual jasa pembuatan karya tulis yang marak iklannya di berbagai media online. Dengan memiliki keterampilan menulis, maka guru akan menghemat pengeluaran dalam pembuatan karya tulis dan lebih memiliki rasa percaya diri dan menjaga harkat dan martabat diri.

Karenanya reformasi sekolah sangat dibutuhkan untuk membangun kembali visi dan misi yang sama dari komponen masyarakat yang ada untuk membangun koalisi literasi. Koalisi ini dibutuhkan sebagai perekat untuk menyatukan kepingan potensi yang terserak sehingga gerakan membaca dan menulis dimulai dari sebuah gerakan skala mikro masyarakat di tingkat daerah hingga menjadi gerakan skala makro di tingkat nasional. Untuk percepatan terbentuknya koalisi budaya membaca dan menulis ini, nampaknya dibutuhkan kesungguhan dari para pengambil kebijakan (pemerintah) hingga masyarakat agar kebiasaan membaca dan menulis ini menjadi suatu kebutuhan baik di tingkat keluarga, sekolah dan masyarakat.

## STRATEGI MEMBANGUN BUDATA LITERASI SEKOLAH



Implementasi program literasi digital di Sekolah diharapkan dapat mendorong gerakan membaca pada peserta didik dan warga Sekolah lainnya dalam Mendukung Keterampilan Abad 21, sebagaimana dijelaskan penggunaan komputer dapat mendukung 4C (Zoraini: 2014), The Four Cs of 21st Century Skills, yaitu:

1. **Critical Thinker.** Untuk menjadi seorang critical thinker, peserta didik didorong untuk berpikir kritis dan mampu memecahkan masalah dengan cara diberi permasalahan dalam pembelajaran, dipancing bertanya dan berupaya mencari pemecahan masalah dengan mencari berbagai informasi melalui internet.
2. **Communicator.** Dalam menyiapkan tenaga kerja yang mampu menjadi komunikator, maka peserta didik dilatih untuk memahami dan mengkomunikasikan ide. Setelah memahami apa yang dipelajari, peserta didik didorong untuk membagikan ide-ide yang telah menjadi gagasangagasan sebagaimana apa yang telah diperolehnya melalui kegiatan berliterasi.
3. **Collaborator.** Kemampuan bekerja sama sangat diperlukan dalam melakukan pekerjaan bersama orang lain. Oleh karena itu, dengan literasi digital peserta didik dilatih untuk bekerja sama dengan orang lain, kelompok lain, bidang lain, dengan cara berbagi informasi dan pengalaman melalui media komputer.
4. **Creator.** Lulusan sekolah tidak hanya disiapkan menjadi tenaga kerja formal yang akan bekerja kepada orang lain, akan tetapi juga disiapkan menjadi wirausahawan. Oleh karenanya, kemampuan menjadi creator sangat diperlukan untuk menghasilkan pekerjaan dengan kualitas tinggi. Pekerjaan tersebut dapat berupa barang, jasa, kreasi, yang berdaya guna tinggi, praktis, sederhana dan mudah digunakan, dll.

Agar Gerakan membaca pada tahap pembiasaan di Sekolah dapat berlangsung dengan baik dan lancar, bebarapa konsep dasar tentang membaca perlu dipahami terlebih dahulu oleh para guru dan manajemen Sekolah. Gerakan Literasi Sekolah menjadi salah satu modal dasar dan bagian yang integral dengan hajat besar bangsa Indonesia menyiapkan Generasi Emas Tahun 2045. Untuk meningkatkan minat baca, Pemerintah telah melakukan berbagai gerakan yang bersifat monumental seperti penetapan bulan Mei



sebagai Bulan Buku Nasional, Bulan September sebagai Bulan Gemar Membaca dan Hari Kunjung Perpustakaan, serta Gerakan Wakaf Buku dalam Bulan Desember. Melalui pendidikan nonformal dikembangkan pula Taman Bacaan Masyarakat mengarah pada pusat sumber belajar masyarakat. Akan tetapi upaya-upaya mewujudkan masyarakat gemar membaca dan belajar masih perlu ditingkatkan secara terpadu sehingga berbagai hambatan yang ada dapat diatasi. Untuk memperkuat gerakan literasi nasional ditetapkanlah UU No. 3/2017 tentang Sistem Perbukuan, dengan tujuan:

1. Membangun dan memperkuat industri buku nasional sehingga mampu berkembang, berkolaborasi dan bersaing di tingkat wilayah dan internasional.
2. Mengatur tata kelola perbukuan yang menghasilkan buku bermutu yang mampu mencerdaskan dan membangun integritas kehidupan bangsa;
3. Memperkuat rasa cinta tanah air dan terbangunnya karakter bangsa;
4. Memberikan kemudahan akses kepada masyarakat untuk memperoleh buku;
5. Menumbuhkan budaya minat baca masyarakat;
6. Mewujudkan tata kelola perbukuan yang sehat, kuat, dinamis, berkualitas, memiliki daya saing dan terpadu;
7. Meningkatkan jumlah dan mutu sumber daya perbukuan;
8. Meningkatkan jumlah dan mutu buku yang diterbitkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia;
9. Meningkatkan ketersediaan dan pendistribusian buku secara merata dengan harga yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat;
10. Meningkatkan pemanfaatan buku sebagai sumber belajar dan sarana memperluas wawasan pengetahuan; dan
11. Meningkatkan martabat bangsa melalui industri perbukuan tingkat lokal dan nasional.

Dengan tujuan yang demikian maka UU tentang Sisbuknas diharapkan dapat:

1. Memperjelas pengertian istilah-istilah yang dipergunakan dalam sistem perbukuan;
2. Mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak yang terkait dalam sistem perbukuan nasional;
3. Mengatur tata kelola penulisan dan penerjemahan naskah;
4. Mengatur tata kelola pencetakan buku;
5. Mengatur tata kelola penerbitan buku;
6. Mengatur tata kelola penyaluran buku;
7. Mengatur tata kelola pemanfaatan buku;
8. Mengatur pembinaan perbukuan nasional;
9. Mengatur penghargaan kepada pihak-pihak yang berjasa dalam pengembangan industri perbukuan nasional; serta
10. Mengatur pemberian sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan dalam industri perbukuan nasional.

Pada program Gerakan Literasi Sekolah (GLS) telah terbangun konsensus tentang penciptaan lingkungan literat bagi anak. Tugas kepala sekolah, guru dan tenaga pendidik adalah bersinergi mencetak generasi literat masa depan. Pribadi siswa juga sangat penting diperhatikan untuk memastikan bahwa siswa dapat menemukan relevansi antara

bacaan dan diri mereka sendiri secara pribadi, sehingga dapat tercipta keinginan dan hubungan yang kuat terhadap bahan bacaan.

Karena itu UU system Perbukuan Nasional harus dapat memberikan solusi terhadap fakta data dari Badan Penelitian dan Pengembangan Perpustakaan Nasional, dari 64.000 desa, yang punya perpustakaan 22%. Sedangkan jumlah perpustakaan di berbagai departemen dan perusahaan baru 31%. Dari 110.000 sekolah, hanya 18% yang punya perpustakaan. Dari 200.000 SD, 20.000 yang punya perpustakaan standar. Dari 70.000 SLTP, 36% yang memenuhi standar. Untuk SLTA, hanya 54% yang perpustakaannya standar. Dari 3.000 SD dan SLTP, hanya 5% yang memiliki perpustakaan. Meski dijamin oleh UU, pemerintah belum memenuhi hak masyarakat untuk bisa mengakses perpustakaan dari tingkat provinsi, kabupaten, hingga kecamatan.

Gerakan literasi menjadi sangat penting untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945. Menurut Kern (2000) Terdapat tujuh prinsip pendidikan literasi diantaranya yaitu: Pertama; Literasi melibatkan interpretasi; Penulis/pembicara dan pembaca/pendengar berpartisipasi dalam tindak interpretasi, yakni: penulis/pembicara menginterpretasikan dunia (peristiwa, pengalaman, gagasan, perasaan dan lain-lain) dan pembaca/pendengar kemudian menginterpretasikan interpretasi penulis/pembicara dalam bentuk konsepsinya sendiri tentang dunia. Kedua; Literasi melibatkan kolaborasi; Terdapat kerjasama antara dua pihak yakni penulis/pembicara dan pembaca/pendengar. Kerjasama yang dimaksud itu dalam upaya mencapai suatu pemahaman bersama. Penulis/pembicara memutuskan apa yang harus ditulis/dikatakan atau yang tidak perlu ditulis/dikatakan berdasarkan pemahaman mereka terhadap pembaca/pendengarnya. Sementara pembaca/pendengar mencurahkan motivasi, pengetahuan dan pengalaman mereka agar dapat membuat teks penulis bermakna. Ketiga; Literasi melibatkan konvensi; Orang-orang membaca dan menulis atau menyimak dan berbicara itu ditentukan oleh konvensi/kesepakatan kultural (tidak universal) yang berkembang melalui penggunaan dan dimodifikasi untuk tujuan-tujuan individual. Konvensi disini mencakup aturan-aturan bahasa baik lisan maupun tertulis. Keempat; Literasi melibatkan pengetahuan kultural; Membaca dan menulis atau menyimak dan berbicara berfungsi dalam sistem-sistem sikap, keyakinan, kebiasaan, cita-cita dan nilai tertentu. Sehingga orang-orang yang berada di luar suatu sistem budaya itu rentan/beresiko salah/keliru dipahami oleh orang-orang yang berada dalam sistem budaya tersebut. Kelima; Literasi melibatkan pemecahan masalah; Karena kata-kata selalu melekat pada konteks linguistik dan situasi yang melingkupinya, maka tindak menyimak, berbicara, membaca dan menulis itu melibatkan upaya membayangkan hubungan-hubungan di antara kata-kata, frase-frase, kalimat-kalimat, unit-unit makna, teks-teks dan dunia-dunia. Upaya membayangkan, memikirkan, mempertimbangkan ini merupakan suatu bentuk pemecahan masalah.

Keenam; Literasi melibatkan refleksi dan refleksi diri; Pembaca/pendengar dan penulis/pembicara memikirkan bahasa dan hubungan-hubungannya dengan dunia dan diri mereka sendiri. Setelah mereka berada dalam situasi komunikasi mereka memikirkan apa yang telah mereka katakan, bagaimana mengatakannya dan mengapa mengatakan hal tersebut. Ketujuh; Literasi melibatkan penggunaan bahasa; Literasi tidaklah sebatas pada sistem-sistem bahasa (lisan/tertulis) melainkan mensyaratkan pengetahuan tentang

bagaimana bahasa itu digunakan baik dalam konteks lisan maupun tertulis untuk menciptakan sebuah wacana/diskursus.

## **PENUTUP**

Kebijakan yang cepat dan tepat akan sangat tergantung tingkat pemahaman terhadap literasi. Semakin tinggi tingkat pemahaman literasi suatu bangsa maka kebijakan itu lebih rasional. Sehingga ini membawa kemakmuran suatu bangsa secara keseluruhan. Gerakan Literasi Sekolah merupakan merupakan suatu usaha atau kegiatan yang bersifat partisipatif dengan melibatkan warga sekolah (peserta didik, guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, pengawas sekolah, Komite Sekolah, orang tua/wali murid peserta didik), akademisi, penerbit, media massa, masyarakat (tokoh masyarakat yang dapat merepresentasikan keteladanan, dunia usaha, dll) dan pemangku kepentingan di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Depdiknas . 2003. Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Jakarta: Depdiknas
- Dewey, J. (1916). Nationalizing education. *The Journal of Education*, 84(16 (2102), 425-428.
- Fish, T. R. , Rabidoux, P. , Ober, J. , & Graff, V. L. (2006). Community literacy and friendship model for people with intellectual disabilities. *Mental retardation*, 44(6), 443-446.
- Fitzgerald, J. , Spiegel, D. L. , & Cunningham, J. W. (1991). The relationship between parental literacy level and perceptions of emergent literacy. *Journal of Reading Behavior*, 23(2), 191-213.
- Ismail, Muh. Ilyas. 2008. Ilmu pendidikan dasar ilmu pendidikan praktis. Jakarta: Ganeca Exact.
- Kemendikbud. 2015. Permendikbud nomor 23 tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Kern, R. (2000). Literacy and language teaching. Oxford University Press.
- OECD. (2013). PISA 2012 assasement and analytical framework: Mathematics, reading, science, problem solving and financial literacy. Diakses dari <http://www.oecd.org> pada tanggal 16 november 2017.
- Ollila, L. O. , & Mayfield, M. I. (Eds. ). (1992). *Emerging literacy: Preschool, kindergarten, and primary grades*. Toronto: Allyn and Bacon.
- Pannen, P. , & Zoraini, W. A. (2014). *E-learning Models in Indonesia*.
- Sulzby, E. (1986). Writing and reading: Signs of oral and written language organization in the young child. *Emergent literacy: Writing and reading*, 50-89.
- UNESCO (2003), *World declaration on education for all and framework for action to meet basic learning needs*. international consultative forum on education for all. Paris: UNESCO.